**Ilmuwan Perempuan dan Kepemimpinan Akademik**

Oleh Rizka Nur Laily Muallifa

Ilmuwan perempuan Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak, namun kepemimpinan akademik perempuan secara struktural masih sedikit sekali. Jika tak sedikit kicauan mengenai persoalan minimnya kepemimpinan perempuan sebagai pucuk pimpinan di perguruan tinggi di Indonesia, maka Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu representasinya. Ilmu memang sudah begitu jauh membebaskan kaum perempuan menjadi pembelajar ilmu, namun masih belum sampai menjadikan perempuan pantas, selayaknya, bahkan sudah sewajibnya menjadi pemimpin akademik di perguruan tertinggi di negeri ini.

Terpilihnya Dwikorita Karnawati (2014-2017) sebagai rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menggantikan Pratikno membuat jagad pemberitaan kepemimpinan akademik perempuan kembali ramai. Beberapa situs berita *online* kembali mengulas fenomena rektor perempuan dan gambaran kinerjanya. Sebagai contoh, rektor perempuan pertama Universitas Sriwijaya, Badia Perizade dengan kegigihan kerjanya mampu memegang tampuk kekuasaan tertinggi *civitas academica* selama dua periode. Universitas Sriwijaya meraih beberapa capaian yang membanggakan di bawah tangan cerdas Badia Perizade.

Sedangkan UNS menghadirkan kembali sosok Ravik Karsidi beserta jajaran pemimpin tertinggi universitas yang kesemuanya laki-laki sejak UNS berdiri tahun 1976. Sedikit berbeda dengan pucuk pimpinan UNS yang kesemuanya diduduki laki-laki itu, pada pelantikan dekan sepuluh fakultas lalu dijumpai dua sosok perempuan. Dua orang perempuan itu adalah Hunik Sri Runing Sawitri yang terpilih sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Ismi Dwi Astuti Nurhaeni sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Kehadiran keduanya ibarat oase bagi perempuan-perempuan lain yang berkecimpung di dunia *civitas academica* UNS. Keduanya menjadi gambaran dan bukti bahwa dalam dunia kepemimpinan akademik, perempuan dan laki-laki memiliki kedikdayaan yang setara.

Meskipun terlihat geliat menuju kesetaraan gender, namun hal itu masih sangat minim terjadi di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Sampai usianya yang menuju dekade keempat, belum pernah sekalipun rektor UNS dijabat oleh seorang ilmuwan perempuan. Seolah menjadi dekan adalah batas maksimal kemampuan kepemimpinan yang mampu diemban perempuan-perempuan di *civitas academica* UNS. Itupun masih sangat terbatas jumlahnya. Barangkali, hal ini diperbenarkan secara gender politis bahwa jumlah rasio tenaga pendidik berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebesar 65% jauh lebih banyak dibanding jumlah tenaga pendidik perempuan yang hanya berkisar 35%.

Mengingat jumlah kaum perempuan yang jauh di bawah laki-laki, rupanya memiliki makna berbeda bagi dekan terpilih FEB dan FISIP yang akan menjabat sampai tahun 2018. Dekan terpilih FISIP Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, menurut cerita beberapa teman FISIP yang mengalami langsung kepemimpinannya, ialah sosok yang cerdas dan memiliki pembawaan cakap ketika berhadapan dengan publik, selain juga tergolong senior ihwal masa kerjanya di lingkungan *civitas academica* UNS. Kombinasi antara hal-hal tersebut yang membuat senat fakultas memercayakan pucuk pimpinan FISIP dan menaruh berbagai harapan ihwal capaian-capaian akademik dan/non-akademik pada tangan cekatan seorang perempuan bernama Ismi. Terbukti, seorang mahasiswa aktif jurusan Sosiologi FISIP UNS menyatakan bahwa gerak birokrasi yang dijalankan Ismi lebih luwes dan fleksibel.

Bila boleh meminjam istilah Saparinah Sadli (1990: viii) dalam *Perempuan dan Ilmu,* disadari atau tidak, ke depan, fenomena kepemimpinan akademik perempuan akan bisa menjadi ‘*role model*’ yang dapat dipilih perempuan-perempuan lain dalam proses pengembangan karirnya, khususnya bagi mereka yang telah memiliki peluang menjadi pemimpin-ilmuwan.

**Gerak Pengetahuan Perempuan**

Pada dasarnya semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan ilmu pengetahuan. Demikianlah yang bisa disimpulkan dari hasrat berpengetahuan yang diperjuangkan R.A.Kartini untuk kaum perempuan. Kartini sudah menyadari bahwa sumber pengetahuan tidak mungkin membuat perbedaan untuk dikuasai hanya karena seseorang berkelamin lelaki dan yang lainnya berkelamin perempuan. Sebagai contoh, baik di hadapan pembaca laki-laki maupun perempuan buku-buku teks (termasuk yang dianggap berasal dari Tuhan) tidak hadir dengan rupa berbeda.

Sayangnya, realitas dasariah keilmuan sering berbeda dengan realitas sosial kemasyarakatan. Kita wajib mengakui bahwa sejarah keilmuan di Indonesia adalah budaya (ilmu) patriarki yang alot. Sejarah perjuangan emansipatif dalam berilmu yang diperjuangkan Rohana Kudus (1884-1972), R.A. Kartini (1879-1904), Maria Malanda Maramis (1872-1924), Dewi Sartika (1884-1947) adalah perjuangan menghapus partiarki berilmu dalam masyarakat kita. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam mengakses dan mendapatkan pendidikan dan pengetahuan menjadi perjuangan mahapenting sejak modernitas kemajuan melanda Indonesia pada akhir abad ke-19. Bisa dilihat dari keberadaan sekolah-sekolah Barat yang ada di Indonesia seperti HIS, STOVIA, HBS yang sebagian besar pelajarnya adalah kaum laki-laki dan memang mereka dididik untuk menjadi pemimpin dan menjadi penggerak kebangkitan nasionalisme Indonesia. Perempuan, praktis harus tertatih-tatih menyusul di belakangnya. Ihwal ini, Kartini sudah menyadari dan petentang-petenteng menyuarakan perlunya kaum perempuan Indonesia untuk wajib berpendidikan setara. Kebudayaan berilmu yang patriarkis dalam bentuk pembatasan-pembatasan terhadap pemampuan keilmuan perempuan Indonesia, terutama perempuan sebagai pribadi berilmu, menjadi perjuangan yang sampai sekarang masih terus berlanjut.

Selanjutnya, berkat adanya Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang no. 4 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran mulai ada kemungkinan terbukanya kesetaraan akses pendidikan dan pengetahuan bagi perempuan secara legal konstitusional. Soegarda Poerbakawatja (1970: 247), dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka,* mengatakan dengan tepat, “Maka terbukalah kesempatan seluas-luasnja bagi wanita Indonesia untuk dalam suatu *‘fair competition’* dengan kaum pria mendapatkan tempat dan kedudukan dalam masjarakat, dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.” Meski begitu, tetap saja ada batasan-batasan yang terasa mengungkung alam kebebasan pikiran kaum perempuan yang justru hidup dalam masyarakat dan terefleksikan di dunia kampus atau dalam benak pembuat kebijakan pendidikan di Indonesia. Mari kita perhatikan penjelasan lanjutan Soegarda Poerbakawatja (1970: 249): “dalam melihat kemungkinan wanita bersama-sama dengan pria mempergunakan kesempatan untuk mentjapai kemadjuan melalui pendidikan, masih perlu diperhatikan bentuk, djenis dan sifat pendidikan jang sesuai dengan sifat-sifat chusus wanita”.

Pendidikan perempuan pada masa itu lebih menekankan pada sekolah-sekolah kejuruan yang mempersiapkan perempuan untuk memiliki keterampilan praktis yang berguna untuk menunjang kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat seperti menjahit, membatik, menganyam, mengarang bunga, bidan, juru rawat dan sekretaris. Bahkan sampai saat ini, batasan-batasan perempuan dalam upayanya berkembang di bidang pendidikan dan pengetahuan masih terasa begitu kentara. Memang, perempuan telah memiliki *hak* dan *kesempatan* yang sama dengan laki-laki untuk memasuki dunia *civitas academica* baik untuk mengenyam pendidikan tinggi maupun untuk berkiprah di institusi pendidikan tinggi sebagai tenaga pendidik. Namun, hal itu menjadi berbeda ketika perempuan sudah terjun dalam institusi pendidikan tertinggi sebagai ilmuwan pemimpin.

“Saya merasa seperti pohon tomat yang harus disanggah dari kiri kanan agar dapat tetap berdiri tegak,” kata seorang perempuan doktor dalam buku *Perempuan dan Ilmu Pengetahuan*. Ungkapan itu dinyatakan seorang Doktor perempuan yang menyelesaikan studi doktornya di luar negeri sambil mengasuh anak balitanya. Hal ini mengindikasikan bahwasanya dalam upayanya mengekspresikan dan memampukan diri di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan perempuan terkendala oleh hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya sebagai istri dan ibu dalam keluarganya. Dan sampai sekarang, tuntutan untuk menjadi kaum ibu jauh lebih kuat daripada tuntutan menjadi seorang ilmuwan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak di sekitar termasuk keluarga dan kolega kerjanya sangat dibutuhkan oleh perempuan dalam upayanya mencapai aspirasi pribadinya. Sayangnya, dukungan agar perempuan menjadi ilmuwan masih terasa kurang, termasuk dalam ketatakerjaan struktural perempuan di institusi pendidikan tinggi. ‘Dibutuhkan upaya tiga kali lipat bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuannya setara dengan kemampuan laki-laki,’ ungkap Badia Perizade mengenang masa-masa kepemimpinannya sebagai rektor Universitas Sriwijaya.

**Masa Depan Ilmuwan Perempuan**

Di masa depan, apa yang dikatakan Badia Perizade pasti masih bisa kita temukan, mengingat institusi kampus masih dikuasi kaum lelaki. Namun, bertolak kepada jumlah rasio mahasiswa perempuan, termasuk di Universitas Sebelas Maret, kita tahu bahwa mahasiswi mendominasi rasio yang berbeda dengan kepemimpinan struktural perempuan di kampus. Tentu saja hal ini menunjukkan fenomena baru dalam masyarakat kita berkat mulai diterima secara penuh perempuan terdidik. Munculnya kesadaran perempuan berpendidikan tinggi seharusnya menjadi pertimbangan urgen di masa sekarang dan masa depan ihwal kaderisasi ilmuwan dan kepemimpinan akademik perempuan di lingkungan Universitas Sebelas Maret (juga di seluruh kampus di Indonesia). Jika selama ini penelitian yang dihasilkan tenaga pendidik perempuan jumlahnya lebih sedikit dibanding penelitian yang dihasilkan laki-laki dikarenakan jumlah perempuan yang jauh lebih sedikit dibanding laki-laki, maka tidak menutup kemungkinan hal itu akan berbalik di masa-masa mendatang. Bukankah dapat dikatakan demokratis apabila kepentingan mayoritas terakomodasi, selain tetap memberikan kesempatan setara bagi minoritas. Demikian halnya dengan jabatan rektor dan jajaran pimpinan tertinggi universitas yang masih didominasi laki-laki, sesekali Universitas Sebelas Maret perlu merubah tradisi patriarkinya.

Kita perlu membuka lagi buku *30 Tahun UNS Mengabdi (1976-2006)* yang sedikit banyak masih bernuansa patriarkis itu. Dalam subjudul *Pemantapan Demokratisasi Pengelolaan Perguruan Tinggi*, kita mendapati kehendak membuat kebijakan pemantapan demokratisasi dalam pengelolaan perguruan tinggi, khususnya dalam fungsi Senat Universitas sebagai lembaga normatif dan pengawasan keberjalanan program-program perguruan tinggi. Salah satu yang dibahas adalah ihwal penanganan suksesi rektor yang meliputi penjaringan bakal rektor sampai proses pemilihan rektor pada tingkat senat. Dalam buku itu, nyata harapan UNS akan adanya iklim demokrasi yang mengiringi proses terpilihnya rektor. Berpijak dari harapan itu dan dihadapkan pada kenyataan mayoritas mahasiswa aktif UNS didominasi oleh kaum perempuan, menjadi perlu diadakan pengkajian ulang ihwal pemilihan rektor. Inilah harapan masa depan kaum perempuan di dunia akademik.

Akhirnya, kembali pada sifat dasariah ilmu pengetahuan yang membebaskan dan setara bagi tiap manusia, kepemimpinan kaum perempuan di perguruan tertinggi di Indonesia adalah sudah sewajarnya diterima dan dianjurkan. Dan saya percaya bahwa kepemimpinan perempuan dalam dunia akademik bisa jauh lebih memajukan ilmu pengetahuan khususnya di UNS dan di Indonesia. Yakinlah!

**Data Diri Penulis**

**Nama: Rizka Nur Laily Muallifa**

**NIM: K7514053**

**Prodi: Pendidikan Administrasi Perkantoran**

**Nomor ponsel: 085 730 9559 64**

**Email: muallifa13@gmail.com**